

**ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERDATA DAN *RAHN*
TASJILY DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**ANITA CHANDRA HARTONO
I000170106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERDATA DAN *RAHN*
TASJILY DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ANITA CHANDRA HARTONO
1000170106

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen
Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M. Ag
NIDN 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN




**ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERDATA DAN *RAHN*
TASJILY DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH

ANITA CHANDRA HARTONO
I000170106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Jum'at, 30 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Imron Rosyadi, M. Ag (Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Fauzul Hanif N. A., Lc., M.Sc (Anggota 1 Dewan Penguji) | () |
| 3. Azhar Alam, S.E., M.SEI (Anggota 2 Dewan Penguji) | () |



Dekan



Drs. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan , bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 30 Juli 2021

Penulis



ANITA CHANDRA HARTONO
1000170106

ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERDATA DAN RAHN TASJILY DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstrak

Fenomena pengambilalihan barang jaminan secara sepihak oleh *debt collector* marak terjadi di masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia dan hukum syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan eksekusi barang jaminan fidusia dan *rahn tasjily* serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur apabila barang jaminan diambil alih secara sepihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber penelitian berasal dari sumber primer, sekunder dan tersier. Kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam eksekusi jaminan fidusia pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan *titel eksekutorial*, *parate eksekusi* dan penjualan dibawah tangan atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Sedangkan dalam *rahn tasjily* eksekusi barang jaminan dengan cara, apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* dengan persetujuan *rahin*. Apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan *murtahin*, maka pengadilan dapat memaksa *rahin untuk* membayar hutangnya atau menjual *marhun* melalui lelang syari'ah. Dalam upaya untuk melindungi debitur agar tidak terjadi pengambil alihan barang jaminan secara sepihak, maka pemerintah memberi perlindungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2011.

Kata kunci: eksekusi, jaminan fidusia dan *rahn tasjily*.

Abstract

The phenomenon of taking collateral goods unilaterally by debt collectors is rife in the community. This is very much against the law in Indonesia and sharia law. This study aims to determine the difference between the execution of fiduciary collateral and *rahn tasjily* and to determine the legal protection for the debtor if the collateral is taken unilaterally. This research uses normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. Research sources come from primary, secondary and tertiary sources. Then analyzed using qualitative analytical methods. The results of this study are that in the execution of fiduciary guarantees, the execution is carried out with an executorial title, execution parate and underhand sales upon the agreement of the fiduciary giver and recipient. Meanwhile, in *rahn tasjily*, the execution of collateral is done by, if *rahin* cannot pay off the debt, then the *murtahin* can sell the *marhun* with *rahin's* approval. If the *rahin* does not approve of the sale of the *murtahin*, the court can force the *rahin* to pay the debt or sell the *marhun* through a shari'ah auction. In an

effort to protect debtors from taking over collateral goods unilaterally, the government provides protection with the issuance of Regulation of the Minister of Finance No. 130/PMK.010/2012, the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 8 of 2011.

Keywords: execution, fiduciary guarantee and *rahn tasjily*.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi di jaman sekarang ini, kebutuhan hidup masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini terkadang tidak diimbangi dengan pendapatan yang mereka peroleh saat bekerja. Karena tuntutan jaman yang semakin maju serta gaya hidup yang semakin tinggi, maka masyarakat menjadi konsumtif sehingga menjadikan mereka tidak ragu untuk mengajukan suatu pembiayaan di lembaga pembiayaan konvensional maupun lembaga pembiayaan berbasis syariah.

Jenis pembiayaan yang sering diajukan oleh masyarakat adalah pembiayaan jenis utang-piutang atau kredit yang biasanya pada pembiayaan tersebut juga disertai dengan adanya jaminan suatu barang. Masyarakat cenderung lebih suka mengajukan pembiayaan tersebut karena mereka bisa memiliki barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara kontan, tetapi dengan membayarnya secara berkala.

Dalam perkembangannya, sekarang ini banyak sekali lembaga pembiayaan yang memfasilitasi adanya pembiayaan utang-piutang disertai dengan adanya jaminan suatu benda. Hal tersebut pastilah sangat menguntungkan antar kedua belah pihak. Salah satu lembaga pembiayaan disertai adanya barang jaminan yang banyak diminati masyarakat sekarang ini adalah *leasing* dan pegadaian syariah.

Pada hukum perdata, jaminan kebendaan diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasannya Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sedangkan dalam aturan hukum Islam, jaminan kebendaan dikategorikan dalam *Rahn Tasjily*. Hal tersebut juga telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Bentuk jaminan kebendaan yang dimaksud dalam *rahn tasjily* mirip dengan pengertian fidusia yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terdapat kesamaan dalam pengertian *rahn tasjily* dengan fidusia, terutama dalam hal penguasaan jaminan secara fisik tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa fatwa DSN MUI tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syariah.

Maraknya pembiayaan pembelian kendaraan bermotor oleh perusahaan *multi finance* akhir-akhir ini, melahirkan permasalahan yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam beberapa kasus dikeluhkan tindakan yang dilakukan oleh pemegang jaminan fidusia diluar batas kewajaran, seperti “menarik paksa” di tengah jalan oleh *debt collector*. Perbuatan tersebut dianggap di luar kewajaran dan dapat menjatuhkan harga diri seseorang, meskipun dengan alasan debitur menunggak cicilan atau telat dalam memenuhi isi perjanjian (akad).

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mencari suatu perbedaan dalam masing-masing hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bahan atau sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah,

Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, tesis dan KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif ini dilakukan menggunakan studi pustaka dan penelusuran (*searching*) terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Setelah seluruh pengumpulan bahan hukum selesai dilaksanakan, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran yang bertujuan untuk menafsirkan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Eksekusi

Eksekusi adalah bagian tidak terpisahkan dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekusi masuk dalam ranah hukum perdata. Proses eksekusi hanya mungkin timbul apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya, ketentuan pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg. atau Stb. 1927 No. 227. Ketentuan pasal 54 ayat 2 sampai 3 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada beberapa prinsip dalam eksekusi, diantaranya; putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat *Condemnatoir*, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan, dan putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dari berbagai literatur yang disampaikan para sarjana hukum, secara umum eksekusi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Namun, Sudikno Mertokusumo menambahkan klasifikasi eksekusi, yaitu eksekusi melaksanakan perbuatan. Adapun prosedur atau tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang jaminan antara lain sebagai berikut; mengajukan surat permohonan eksekusi, *Aanmaning* (teguran/perintah), Tidak mengindahkan *Aanmaning*, Keputusan belum *In Kracht Van Gewijsde*, Keputusan *In Kracht Van Gewijsde*.

3.2 Konsep Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999, menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. unsur-unsur dalam jaminan fidusia yaitu ; (a) Adanya hak jaminan, (b) Adanya objek jaminan, (c) Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, (d) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua macam, yaitu; (a) Benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, (b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, yaitu; (a) Pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh penerima fidusia, (b) *Parate eksekusi*, (c) penjualan dibawah tangan objek jaminan fidusia.

3.3 Konsep *Rahn*

Rahn secara bahasa berarti *al tsubut wa al dawam* (tetap dan langgeng), *al habsu* (menahan). *Rahn* dalam Islam dikonstruksikan sebagai jaminan kebendaan yang bertujuan untuk pelunasan utang apabila terjadi kegagalan pembayaran utang. Dasar hukum diperbolehkannya *Rahn* terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 283, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ

“jika kamu dalam perjalanan (dan tidak bermuamalah secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang saya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. Bukhori dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
 إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Dalam transaksi *Rahn* terdapat beberapa unsur yang menjadi rukun yaitu; (a) *Al- 'aqidaini*, terdiri dari *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (orang yang menerima gadai). (b) *Sighat* atau ungkapan akad gadai harus menunjukkan ungkapan *ijab* dan *qabul*. (c) *Marhun Bih* (Utang), (d) *Marhun* (barang gadai).

Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, *Rahn Tasjily* atau disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.

- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

3.4 Perbedaan Eksekusi Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily*

Penyebab pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan *rahn tasjily* secara garis besar dikarenakan oleh adanya cedera janji atau wanprestasi. Hal ini merupakan sedikit persamaan antara jaminan fidusia dan *rahn tasjily*. Sedangkan pada pelaksanaan eksekusi, keduanya memiliki perbedaan dalam hal cara atau teknisnya. Berikut akan diuraikan perbedaan eksekusi pada jaminan fidusia dan *rahn tasjily*.

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
Yang dimaksud titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim.
- b. *Parate Eksekusi*, yaitu penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).

Sedangkan pada eksekusi *rahn tasjily* eksekusi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam hal *rahin* atau pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* dengan persetujuan dan sepengetahuan *rahin*.
- b. Apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan *marhun* oleh *murtahin*, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk membayar hutang atau menjual barangnya melalui lelang syariah.

3.5 Perlindungan Hukum Bagi Debitur Apabila Barang Jaminan Diambil Secara Sepihak

Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pengikatan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Eksekusi barang jaminan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah *debt collector*.

Tata cara pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia milik debitur yang cedera janji atau wanprestasi sudah diperjelas pada peraturan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada intinya bahwa MK memutuskan penarikan barang *leasing* oleh kreditur tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Namun, apabila pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan, maka pihak kreditur dapat melaksanakan eksekusi sendiri atau *parate eksekusi* tanpa melalui pengadilan.

Pada saat pelaksanaan eksekusi barang jaminan, sebaiknya ada pendampingan dari pihak kepolisian yang mendapatkan surat tugas. Regulasi ini dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kepolisian berwenang memberikan bantuan

pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Peraturan Kapolri ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perbedaan eksekusi barang jaminan fidusia dan eksekusi barang jaminan pada *rahn tasjily* terletak pada cara atau mekanisme dalam eksekusi tersebut. Pada eksekusi barang jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; (a) pelaksanaan *titel eksekutorial*, (b) *parate eksekusi*, (c) penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Sedangkan dalam eksekusi barang jaminan *rahn tasjily* pelaksanaan eksekusi barang jaminan dilakukan dengan lima cara, yaitu; (a) Dalam hal *rahin* atau pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* dengan persetujuan dan sepengetahuan *rahin*. (b) Apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan *marhun* oleh *murtahin*, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk membayar hutang atau menjual barangnya melalui lelang syariah.

Dalam upaya perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi pengambilan barang jaminan secara sepihak, maka pemerintah membuat beberapa kebijakan atau peraturan agar tidak terjadi pengambilalihan barang jaminan tersebut secara sewenang-wenang oleh pihak lembaga pembiayaan atau *leasing* yang biasanya menggunakan jasa pihak ketiga, dalam hal ini adalah *debt collector*. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada intinya bahwa MK memutuskan penarikan barang *leasing* oleh kreditur tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Serta pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan dijelaskan oleh penulis diatas, maka penulis akan memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak terkait, diantaranya yaitu;

4.2.1. Bagi Kreditur

Dengan adanya aturan baru mengenai penjelasan eksekusi jaminan fidusia yang tertera pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka diharapkan lembaga pembiayaan (kreditur) agar bisa melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak melibatkan *debt collector*. Serta dengan adanya Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSNMUI/III/2008 Rahn Tasjily, lembaga pembiayaan syariah supaya bisa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan eksekusi objek *rahn tasjily*.

4.2.2. Bagi Debitur

Bagi nasabah (debitur), supaya tidak melakukan tindakan cedera janji atau wanprestasi saat mengajukan pembiayaan yang disertai barang jaminan. Agar tidak terjadi pelaksanaan eksekusi barang oleh pihak kreditur. Sehingga bisa tercipta rasa keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan disaat mengajukan pembiayaan serta bisa saling memberi manfaat dan keuntungan antara kedua belah pihak.

4.2.3 Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Kepada Fakultas Agama Islam, terutama pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah khasanah ilmu serta sebagai bahan rujukan pembelajaran dalam bidang ekonomi syariah dan hukum perdata.

4.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada para akademisi dan praktisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa digunakan sebagai bacaan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2016. "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)". *e-Jurnal IAIN Kudus*, Vol. 4 No. 2
- Adityo, Dwi Rayno. 2015. "Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan". *e-jurnal yuridis UPN Veteran Jakarta*, Vol. 2 No. 1
- Fadllan. 2014. "Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan". *e-jurnal IAIN Madura*, Vol. 1 No. 1

- Fatwa DSN-MUI 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
- Hafidah, Noor. 2013. "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah". *e-Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. 8 No. 2
- Hafidah, Noor. 2017. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Hilal, Nu'man Mohamad. 2018. "Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syariah". *e-Jurnal Universitas Islam Bandung*, Vol. 1 No. 2
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012. tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Putusan No. 18/PUU/XVII/2019 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Riwayani, Tri Ayu. 2015. "Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum *Rahn Tasjili* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008". *Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Rizka. 2016. "Fidusia dalam Lingkup Hukum Jaminan dilihat dari Sudut Pandangan Islam", *e-Jurnal EduTech Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 2 No. 1
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Malang: Kencana.
- Rosyadi, Imron. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surakarta: UMS Press
- Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Surepno. 2018. "Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah". *e-Jurnal of Sharia Economic Law IAIN Kudus*, Vol. 1 No. 2